



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
UNIT KERJA : DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : EKO JULIANTO
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 173832

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.075.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 84 m2/36 m2 di KAB / KOTA TUBAN, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 212 m2/170 m2 di KAB / KOTA TUBAN, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
3. Tanah Seluas 1444 m2 di KAB / KOTA JOMBANG, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 248.000.000

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
2. MOTOR, HONDA BEAT STREET Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 16.500.000
3. MOBIL, KIJANG INNOVA TOYOTA Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 210.000.000
4. MOTOR, HONDA VARIO MATIC Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 16.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 75.000.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ---**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 169.000.000**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---

Sub Total Rp. 1.567.000.000

III. HUTANG Rp. 10.000.000



IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

1.557.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.